

## **SIARAN PERS**

**Nomor: IP.201/1/25/BLT/2021**

### **TINGKATKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN, BALITBANGHUB KAJI PENATAAN TARIF KRL JABODETABEK**

Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) tengah mengkaji persepsi pengguna terhadap tarif dan pelayanan KRL Jabodetabek. Sebelumnya telah dilaksanakan Survei Online Pengguna Jasa Commuter Line terkait Rencana Penyesuaian Tarif, yang didasarkan Surat Permohonan dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Juni lalu.

Sejak tahun 2016 tarif Commuter Line / KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan, dimana dalam kurun waktu 4 tahun terakhir tersebut telah terjadi banyak perubahan, seperti tingkat inflasi dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kendati demikian, PT. Kereta Commuter Indonesia, tidak langsung melakukan kenaikan tarif karena beberapa faktor yang dipertimbangkan, yakni kemampuan dan kesediaan pengguna dalam membayar tarif KRL.

Melalui FGD yang digelar oleh Badan Litbang Perhubungan bersama PT KAI Commuter bertajuk Pengembangan dan Penataan KRL Jabodetabek pada Senin (6/12), Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Danto Restyawan mengatakan bahwa beban Public Service Obligation (PSO) untuk KRL Jabodetabek masih cukup besar, maka penataan tarif perlu dilakukan guna mendorong kemandirian operator dan tidak bergantung kepada PSO, sehingga akan mengurangi beban anggaran pemerintah.

Pengguna KRL dikenakan tarif sebesar tiga ribu rupiah untuk 25 km pertama, yang berarti sebesar sembilan ribu lima ratus ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk menekan beban PSO tersebut dengan harapan dapat menaikkan tarif sebesar seribu rupiah pada 25 km pertama.

“Kami tidak serta merta menaikkan tarif KRL, tetapi harus melihat dari kemampuan masyarakat dalam membayar yang tidak bisa hanya dilihat dari sisi pekerja saja, namun juga masyarakat lain pada umumnya,” ujar Danto Restyawan.

Peneliti Badan Litbang Perhubungan, Reni Puspitasari dalam paparannya memperlihatkan hasil survey yang telah dilakukan oleh Balitbanghub dimana sebanyak 83,32% responden sering melaksanakan perjalanan menggunakan KRL Jabodetabek. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna KRL secara garis besar merupakan komuter yang frekuensi menggunakan KRL-nya tinggi serta didominasi untuk tujuan bekerja (69,32%).

Lebih lanjut, Reni Puspitasari menerangkan bahwa Nilai Ability To Pay (ATP) pada 25 km pertama adalah Rp4.988,- dan 10 km berikutnya adalah Rp2.125,-. Penyesuaian tarif yang ditawarkan kepada responden, diperoleh nilai persentase WTP terbanyak sebesar 64,11%, yaitu Rp3.000,- di 10 km pertama, dan Rp1.000,- untuk 10 km berikutnya. Sedangkan dari hasil perhitungan diperoleh nilai Willingness To Pay (WTP) di 25 km pertama adalah Rp4.438,- dan WTP di 10 km berikutnya adalah Rp1.775,-. Sejalan dengan hal tersebut, terlihat dari hasil perhitungan bahwa nilai ATP masih lebih kecil daripada WTP

“Jika tarif dinaikkan, sebanyak 70% responden masih akan tetap menggunakan KRL, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna KRL merupakan captive rider,” ujar Reni Puspitasari.

Adapun harapan utama responden untuk peningkatan kualitas pelayanan didominasi oleh meningkatkan frekuensi perjalanan (42,27%), meningkatkan pelayanan dalam KRL (29,90%), dan meningkatkan integrasi dengan angkutan umum lainnya (15,26%).

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif KRL masih mampu dibayar oleh masyarakat dan mereka akan tetap menggunakan KRL sehingga dapat menjadi acuan untuk kenaikan tarif yang wajar dan tidak menjadi beban berat masyarakat di kondisi pandemi.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Pemasaran PT KCI, Wawan Ariyanto mengatakan bahwa selama masa pandemi KAI Commuter Line tetap menambah layanan dan menjalankan berbagai penugasan, meski volume pengguna turun.

“Di masa pandemi, pembangunan, revitalisasi, dan berbagai penambahan fasilitas layanan tetap berjalan. Beberapa pembangunan stasiun diantaranya yaitu Stasiun Bekasi, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Jatinegara. Untuk infrastruktur dan fasilitas layanan seperti parkir sepeda, ruang laktasi dan underpass stasiun dilengkapi lift. Selain itu juga penambahan wastafel dan alat cek suhu di seluruh stasiun serta pos kesehatan di 30 stasiun,” terang Wawan Ariyanto.

Biaya untuk layanan selama pandemi pun bertambah mengingat komponen di masa pandemi pun bertambah seperti K3, pegawai, informasi, hospitality & kebersihan, digitalisasi pelayanan, alat pelindung diri petugas, sewa & bangun prasarana, masker, hand sanitizer pengguna, serta pembelian dan perawatan sarana.

Hadir sebagai pembahas, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengatakan bahwa kenaikan tarif agar segera ditetapkan, dengan catatan harus berbanding lurus dengan peningkatan layanan, dan juga ada dispensasi tarif untuk pelajar dan manula.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, turut menyampaikan bahwa subsidi yang sudah semakin tinggi membuat kenaikan tarif mutlak diperlukan untuk mendorong kemandirian operator. Selain itu juga melihat dari kemampuan beberapa pengguna KRL Jabodetabek.

Dengan adanya FGD ini diharapkan dapat terumuskannya kebijakan pengembangan transportasi massal perkotaan dan untuk merancang penataan tarif KRL sesuai dengan daya beli masyarakat.

\*\*

6 Desember 2021

BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

Email: [Balitbanghub@dephub.go.id](mailto:Balitbanghub@dephub.go.id)

Facebook: [balitbanghub](#)

Twitter: [balitbanghub151](#)

Instagram: [balitbanghub](#)